

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI PETANI TERHADAP ALOKASI DANA DESA UNTUK PENGELOLAAN BUMDES BIDANG BIDANG PERTANIAN KABUPATEN BARITO KUALA

Nina Budiwati*, Masyhudah Rosni

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Indonesia

*Penulis korespondensi: ninabudiwati@ulm.ac.id

Abstrak. Badan usaha milik desa (BUMDes) sangat penting bagi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi desa, untuk itu desa memperoleh bantuan dari pemerintah kabupaten yaitu berupa dana desa yang disalurkan kepada BUMDes. BUMDes yang ada di Kabupaten Barito Kuala terdapat sebanyak 133 BUMDes, 33 diantaranya bergerak di bidang pertanian. Barito Kuala yang memiliki potensi pertanian dengan lahan pasang surutnya, sehingga desa-desa yang ada membentuk BUMDes yang bergerak di bidang pertanian. Berdasar hal tersebut, dilakukan penelitian untuk mengetahui persepsi petani terhadap alokasi dana desa yang digunakan untuk pengelolaan BUMDes yang bergerak dalam bidang pertanian pada lahan pasang surut Kabupaten Barito Kuala, serta hubungan antara persepsi petani dengan karakteristik petani itu sendiri. Analisis yang dilakukan yakni metode interval dengan kategori, serta analisis korelasi triserial. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 60 responden. Responden petani yang paling banyak terdapat pada kelompok umur 41 – 45 tahun, dengan rata-rata pendidikan paling banyak pada level pendidikan dari SMP ke bawah, dan dengan jumlah anggota kebanyakan pada jumlah anggota rumah tangga 2 orang, serta dengan luas lahan garapan kebanyakan pada 0,75 – 1 hektar. Tingkat persepsi petani yang paling dominan pada kategori cukup yakni 43 persen, sisanya berada pada kategori baik sebanyak 22 persen dan kurang sebanyak 35 persen. Pada bagian transparan dan akuntabel persepsi petani yang masih kurang cukup banyak, dibandingkan dengan tingkat persepsi secara keseluruhan. Umur, pendidikan formal dan luas lahan usahatani memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi petani terhadap alokasi dana desa dalam pengelolaan BUMDes yang bergerak dalam bidang pertanian, sedangkan pada variabel jumlah anggota rumah tangga tidak berhubungan signifikan.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, BUMDes, Korelasi triserial, Lahan Pasang Surut, Persepsi

1. PENDAHULUAN

Desa bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Effendi, 2008), kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Seran *et al.*, 2017). Kesamaan visi pada pengembangan kemandirian, kesetaraan, penghargaan, dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal masyarakat desa terutama dalam hal kerjasama (gotong royong) dan keswadayaan di harapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintah masyarakat desa, sehingga desa mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk memberikan pengarah, pengelolaan akan pembangunan maupun bantuan modal untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial (Sumarni *et al.*, 2020).

Salah satu lembaga yang akan membangun dan menopang perekonomian masyarakat desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya dan sebagian besar merupakan kekayaan desa (Dewi, 2014).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk bertujuan untuk memperoleh keuntungan agar bisa memperkuat pendapatan asli desa, meningkatkan perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakat desa (Budiono, 2015). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangatlah penting karena berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa (Umanailo *et al.*, 2018).



Tujuan dan sasaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat tercapai jika dikelola secara terarah dan profesional. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa dan diharapkan dapat mendorong serta menggerakkan perekonomian desa (Agunggunanto *et al.*, 2016). Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan masyarakat desa menjadi lebih mandiri dan menjadi lebih sejahtera. Akan tetapi mengingat masih termasuk hal yang baru dalam keberadaannya, maka tidak heran di dalam prakteknya masih ada beberapa kendala yang muncul terutama dalam segi pembentukan dan pengelolaan (Zulpikar, 2018). Alokasi Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan aspek pembangunan baik fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat (Sulastri, 2016).

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dilakukan dengan melalui fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa (Irma, 2015). Indikator perkembangan desa ini meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat kesehatan. Dengan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) pembangunan fisik selama ini dianggap cukup memenuhi sarana dan prasarana desa, namun demikian desa-desa masih jauh dari yang namanya keberhasilan tentang pembangunan fisik. Dalam kaitannya dengan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan desa-desa dapat lebih mandiri dan inovatif dalam memanfaatkan potensi-potensi yang ada, dan bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, dimana pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Mengingat pentingnya badan usaha milik desa bagi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi desa, maka ditetapkan desa memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota yaitu berupa dana desa yang disalurkan kepada BUMDes guna untuk meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat di desa-desa Kabupaten Barito Kuala.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di kabupaten Barito Kuala terdapat sebanyak 133 BUMDes. Adapun dari jumlah 133 BUMDes tersebut yang bergerak di bidang pertanian sebanyak 33 BUMDes. Hal ini karena, Kabupaten Barito Kuala yang memiliki potensi pertanian dengan lahan pasang surutnya, sehingga desa-desa yang ada membentuk BUMDes yang bergerak di bidang pertanian.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut menurut peneliti, kiranya perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui persepsi petani terhadap alokasi dana desa yang digunakan untuk pengelolaan BUMDes yang bergerak dalam bidang pertanian pada lahan pasang surut Kabupaten Barito Kuala. Selain itu juga mengetahui hubungan antara persepsi petani terhadap alokasi dana desa yang digunakan untuk pengelolaan BUMDes yang bergerak dalam bidang pertanian pada lahan pasang surut Kabupaten Barito Kuala dengan karakteristik petani itu sendiri.

2. METODE

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Barito Kuala. Penentuan lokasi ini ditentukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Barito Kuala merupakan Kabupaten yang memiliki lahan pasang surut yang paling luas di Kalimantan Selatan. Subjek dalam penelitian ini adalah responden dan informan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah petani yang berusahatani pada wilayah penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu Multistage simple sampling. Multistage simple sampling dipilih karena populasi petani yang berusahatani pada wilayah lahan pasang surut yang terdapat BUMDes bidang pertanian tersebar dalam wilayah desa-desa sehingga perlu diambil beberapa desa dan dari desa tersebut baru diambil responden sebanyak 60 orang untuk dijadikan sampel penelitian.

Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (*purposive*) melalui teknik bola salju (*snowball sampling*) yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang berkesinambungan antara informan yang satu dengan informan yang lain. Jumlah informan pada penelitian ini adalah beberapa orang yang terdiri dari, Tokoh masyarakat, Kepala desa, Pengurus BUMDes, dan Badan Permusyawaratan Desa.



Untuk menjawab tujuan pertama yakni persepsi petani terhadap alokasi dana desa yang digunakan untuk pengelolaan BUMDes yang bergerak dalam bidang pertanian pada lahan pasang surut Kabupaten Barito Kuala dilakukan secara kualitatif yang dikuantitatifkan dengan rumus interval, untuk dikategorikan kedalam 3 kategori.

$$Interval = \frac{Rentang (Skor Tertinggi - Skor Terendah)}{Jumlah Kelas} \quad (1)$$

Skor Tertinggi = Jumlah Pertanyaan × Bobot Skor Tertinggi

Skor Terendah = Jumlah Pertanyaan × Bobot Skor Terendah

1. Tingkat persepsi tinggi, jika (skor persepsi $\geq$ Skor Tertinggi – Interval)
2. Tingkat persepsi sedang, jika (Skor Terendah + Interval dan atau $\leq$ skor persepsi $\leq$ Skor Tertinggi – Interval)
3. Tingkat persepsi rendah, jika (skor persepsi $\leq$ Skor Terendah + Interval)

Untuk menjawab tujuan kedua yakni mengetahui hubungan antara persepsi petani terhadap alokasi dana desa yang digunakan untuk pengelolaan BUMDes yang bergerak dalam bidang pertanian pada lahan pasang surut Kabupaten Barito Kuala dengan karakteristik petani itu sendiri dengan menggunakan analisis korelasi triserial.

Untuk mengetahui tujuan kedua, mengetahui hubungan antara partisipasi petani dengan umur, tingkat pendidikan, dan pengalaman usahatani pengujian menggunakan korelasi triserial dengan rumus sebagai berikut (Hadi, 2000):

$$r_{tris} = \frac{\sum \{(O_r - O_t)(M)\}}{SD_{tot} \sum \left\{ \frac{(O_r - O_t)^2}{P} \right\}} \quad (2)$$

Dimana : r_{tris} = Koefisien korelasi triserial

O_r = Ordinat yang lebih rendah

O_t = Ordinat yang lebih tinggi

M = Mean

SD_{tot} = Standar deviasi total

P = Proporsi individu dalam golongan

Suatu korelasi triserial pada rumus diatas dipandang *overestimated*, terlalu tinggi dibandingkan dengan r yang sebenarnya. Adapun faktor korelasinya disebutkan dalam rumus berikut (Hadi, 2000: 400):

$$r_{ch} = r_{tris} \sqrt{\sum \left[\frac{(O_r - O_t)^2}{P} \right]} \quad (3)$$

dimana r_{ch} = korelasi yang masih harus dikoreksi karena kotomisasi atau karena penggolongan secara kasar terhadap r_{ch} itu menjadi *underestimated*, agak terlalu rendah dari $r_{product\ moment}$. Oleh sebab itu korelasi yang terakhir dilakukan menggunakan tabel koreksi untuk kotomisasi dengan mengalikan hasil r_{ch} dengan faktor koreksinya, karena triserial artinya ada 3 golongan atau jumlah kategori = 3 maka faktor koreksinya adalah 1,036. Hasil perkalian antara r_{ch} dengan faktor koreksi tersebut dipandang ekuivalen dengan $r_{product\ moment}$ dan dicatat sebagai r_{xy} . Dalam berkonsultasi dengan tabel harga kritik $r_{product\ moment}$ tidak menggunakan derajat kebebasan db, melainkan N yaitu jumlah kasus yang diteliti (Hadi, 2000).

Untuk menguji signifikansi korelasi triserial digunakan rumus t , dengan derajat kebebasan untuk pengujian ini adalah $N-2$, dengan taraf kepercayaan 95%. Dimana r^2 adalah kuadrat dari r_{ch} yang sudah dikoreksi (r_{xy}). Adapun rumus t yang digunakan untuk menguji signifikansi korelasi triserial adalah sebagai berikut (Hadi, 2000):

$$t = \sqrt{\frac{(r^2)(N-2)}{1-r^2}} \quad (4)$$

Kaidah pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- H_1 ditolak jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$
- H_1 diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah bapak dan ibu rumah tangga petani pada lokasi desa yang BUMDes-nya bergerak dibidang pertanian. Karakteristik rumah tangga petani nanas yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini meliputi variabel umur, jumlah tanggungan / anggota rumah tangga, pendidikan formal, dan luas lahan usahatani.

Secara umum umur dapat menentukan kondisi fisik seseorang dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan pangan. Jika seseorang berada diluar umur produktif, maka kemampuan seseorang tersebut akan berkurang dalam melakukan suatu pekerjaan (usahatani). Sebaran umur responden petani yang berada pada lokasi desa yang BUMDes-nya bergerak dibidang pertanian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran responden berdasarkan kelompok umur

No.	Kelompok Umur	Persentase (%)
1.	< 30 tahun	5
2.	30 – 35 tahun	11
3.	36 – 40 tahun	15
4.	41 – 45 tahun	35
5.	46 – 50 tahun	25
6.	> 50 tahun	9

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1, menunjukkan bahwa responden yang paling banyak terdapat pada kelompok umur 41 – 45 tahun. Sedangkan sebaran responden yang paling sedikit terdapat pada kelompok umur < 30 tahun. Artinya kebanyakan petani di wilayah penelitian didominasi oleh kelompok tua. Walaupun masih dalam batas umur produktif.

Secara umum, umur juga bisa menjadi point penting yang berhubungan positif dengan pengalaman hidup. Semakin tinggi umur seseorang, tentu pengalaman hidupnya akan semakin banyak. Pengalaman hidup yang banyak akan membentuk cara berpikir seseorang dan juga membentuk cara seseorang tersebut dalam pengambilan keputusan.

Melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas diri, karena pendidikan jika dilihat dari sisi petani merupakan suatu proses agar seseorang dapat berubah menjadi lebih baik, mulai dari pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Pendidikan formal merupakan suatu bentuk pendidikan yang secara resmi diakui oleh pemerintah. Semakin tinggi pendidikan seseorang, tentu semakin lebih baik pula cara berpikir bagi orang tersebut dalam pengambilan keputusannya. Adapun sebaran responden petani berdasarkan tingkatan pendidikan formalnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Sebaran responden petani berdasarkan tingkatan pendidikan formal

No.	Pendidikan Formal	Persentase (%)
1.	Tidak Sekolah	3
2.	Tidak Tamat SD	5
3.	Tamat SD	22
4.	Tidak Tamat SMP	4
5.	Tamat SMP	35
6.	Tidak Tamat SMA	16
7.	Tamat SMA	14
8.	Tidak Tamat Perguruan Tinggi	1

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2, menunjukkan bahwa masih banyak petani yang berpendidikan rendah. Jumlah petani yang berpendidikan SMP ke bawah 69%, bahkan masih ada petani yang tidak mengenyam pendidikan sekolah. Sehingga peran serta penyuluh pertanian sebagai agen perubahan yang memberikan penyuluhan sebagai bentuk pendidikan orang dewasa sangat penting bagi petani untuk meningkatkan pengetahuannya.

Jumlah anggota rumah tangga adalah jumlah semua anggota rumah yang ada, tetapi tidak termasuk kepala rumah tangga. Pada umumnya, semakin banyak anggota rumah tangga, tentu semakin banyak pengeluaran, terutama pengeluaran pangan. Akan tetapi juga, semakin banyak anggota rumah tangga yang dapat berperan membantu dalam pekerjaan atau usaha, maka tentu dapat menambah nilai pendapatan. Sebaran responden berdasarkan jumlah anggota rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sebaran responden berdasarkan jumlah anggota rumah tangga

No.	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Persentase (%)
1.	Tidak Ada	1
2.	1 orang	6

3.	2 orang	35
4.	3 orang	27
5.	4 orang	22
6.	> 4 orang	9

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 3, menunjukkan bahwa sebaran responden paling banyak terdapat pada jumlah anggota rumah tangga 2 orang yakni sebanyak 35%. Sedangkan jumlah anggota rumah tangga lebih dari 4 orang sebanyak 9%.

Lahan merupakan faktor produksi dari suatu usahatani, semakin besar luas lahan yang dimiliki, maka produksi yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Walaupun dapat diketahui, ada faktor produksi lain yang menentukan hasil produksi dari suatu usahatani. Hal ini juga berlaku pada setiap usahatani, demikian juga dengan usahatani tanaman pangan. Sebaran responden berdasarkan luas lahan usahatani garapan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sebaran responden berdasarkan luas lahan usahatani garapan

No.	Luas Lahan Usahatani	Persentase (%)
1.	< 0,25 hektar	3
2.	0,25 - 0,5 hektar	8
3.	0,5 - 0,75 hektar	26
4.	0,75 - 1 hektar	42
5.	> 1 hektar	21

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4, menunjukkan bahwa kebanyakan responden memiliki luas lahan antara 0,75 – 1 hektar. Tetapi masih ada petani yang memiliki luas lahan kurang dari 0,25 hektar sebanyak 3%, dan luas lahan antara 0,25 – 0,5 hektar sebanyak 8%.

Jenis komoditas usahatani yang dominan diusahakan adalah tanaman pangan berupa padi sebagai komoditas utama. Untuk tanaman komoditas lainnya yang juga cukup banyak adalah tanaman jeruk dan tanaman kelapa sawit.

Analisis data dengan membuat kategori digunakan untuk mengetahui tingkat persepsi petani terhadap pengelolaan BUMDes pertanian yang menggunakan alokasi dana desa di lahan pasang surut Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan tiga kategori yakni baik, cukup dan kurang. Tingkat persepsi ini dibagi dalam enam bagian indikator yang dilihat yakni terdiri dari sisi kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel. Jika dilihat secara keseluruhan, maka tingkat persepsi petani terhadap pengelolaan BUMDes pertanian yang menggunakan alokasi dana desa dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Sebaran responden berdasarkan tingkat persepsi pengelolaan BUMDes

Kriteria Skor	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
> 66	Baik	13	22
42– 66	Cukup	26	43
< 42	Kurang	21	35

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 5, menunjukkan bahwa tingkat persepsi petani yang paling dominan pada kategori cukup yakni sebanyak 26 responden atau 43 persen. Sedangkan jumlah responden yang memiliki tingkat persepsi yang baik terhadap pengelolaan BUMDes sebanyak 13 responden atau 22 persen, serta yang memiliki persepsi kurang sebanyak 21 orang atau 35 persen.

Pada sisi kooperatif, persepsi yang dinilai yakni masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes, pengurus mampu dalam pengelolaan BUMDes, serta pengurus dan masyarakat dapat bekerjasama dalam pengelolaan BUMDes. Adapun sebaran responden berdasarkan persepsi dari sisi kooperatif dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Sebaran responden berdasarkan tingkat persepsi dari sisi kooperatif

Kriteria Skor	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
> 11	Baik	18	30
7 – 11	Cukup	27	45
< 7	Kurang	15	25

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 6, menunjukkan bahwa tingkat persepsi petani dari sisi kooperatif yang paling dominan pada kategori cukup yakni sebanyak 27 responden atau 45 persen. Sedangkan jumlah responden yang memiliki tingkat persepsi yang baik terhadap pengelolaan BUMDes dari sisi kooperatif sebanyak 18 responden atau 30 persen, serta yang memiliki persepsi kurang sebanyak 15 orang atau 25 persen.

Pada sisi partisipatif, persepsi yang dinilai yakni masyarakat memberikan dukungan dalam pengelolaan BUMDes, pengurus BUMDes ikut serta terlibat memberikan kontribusi secara sukarela tanpa diminta, serta masyarakat dan pengurus ikut serta dalam meningkatkan usaha BUMDes. Adapun sebaran responden berdasarkan persepsi dari sisi partisipatif dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Sebaran responden berdasarkan tingkat persepsi dari sisi partisipatif

Kriteria Skor	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
> 11	Baik	9	15
7 – 11	Cukup	33	55
< 7	Kurang	18	30

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 7, menunjukkan bahwa tingkat persepsi petani dari sisi partisipatif yang paling dominan pada kategori cukup yakni sebanyak 33 responden atau 55 persen. Sedangkan jumlah responden yang memiliki tingkat persepsi yang baik terhadap pengelolaan BUMDes dari sisi partisipatif sebanyak 9 responden atau 15 persen, serta yang memiliki persepsi kurang sebanyak 18 orang atau 30 persen.

Pada sisi emansipatif, persepsi yang dinilai yakni keseluruhan komponen yang berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan kelompok, keseluruhan komponen yang berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan suku, serta keseluruhan komponen yang berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan agama. Adapun sebaran responden berdasarkan persepsi dari sisi emansipatif dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Sebaran responden berdasarkan tingkat persepsi dari sisi emansipatif

Kriteria Skor	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
> 11	Baik	24	40
7 – 11	Cukup	35	58
< 7	Kurang	1	2

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 8, menunjukkan bahwa tingkat persepsi petani dari sisi emansipatif yang paling dominan pada kategori cukup yakni sebanyak 35 responden atau 58 persen. Sedangkan jumlah responden yang memiliki tingkat persepsi yang baik terhadap pengelolaan BUMDes dari sisi emansipatif sebanyak 24 responden atau 40 persen, serta yang memiliki persepsi kurang sebanyak 1 orang atau 2 persen.

Pada sisi transparan, persepsi yang dinilai yakni seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes memiliki pengaruh pada kepentingan umum, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes bersifat terbuka, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes diketahui segala lapisan masyarakat, serta segala pengeluaran dan pemasukan BUMDes diketahui segala lapisan masyarakat. Adapun sebaran responden berdasarkan persepsi dari sisi transparan dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Sebaran responden berdasarkan tingkat persepsi dari sisi transparan

Kriteria Skor	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
> 15	Baik	6	10
9 – 15	Cukup	33	55
< 9	Kurang	21	35

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 9, menunjukkan bahwa tingkat persepsi petani dari sisi transparan yang paling dominan pada kategori cukup yakni sebanyak 33 responden atau 55 persen. Sedangkan jumlah responden yang memiliki tingkat persepsi yang baik terhadap pengelolaan BUMDes dari sisi transparan sebanyak 6 responden atau 10 persen, serta yang memiliki persepsi kurang sebanyak 21 orang atau 35 persen.

Pada sisi akuntabel, persepsi yang dinilai yakni seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dapat dipertanggung jawabkan secara teknis, serta seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Adapun sebaran responden berdasarkan persepsi dari sisi akuntabel dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Sebaran responden berdasarkan tingkat persepsi dari sisi akuntabel

Kriteria Skor	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
> 7	Baik	4	7
5 – 7	Cukup	33	55

< 5	Kurang	23	38
-----	--------	----	----

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 10, menunjukkan bahwa tingkat persepsi petani dari sisi akuntabel yang paling dominan pada kategori cukup yakni sebanyak 33 responden atau 55 persen. Sedangkan jumlah responden yang memiliki tingkat persepsi yang baik terhadap pengelolaan BUMDes dari sisi akuntabel sebanyak 4 responden atau 7 persen, serta yang memiliki persepsi kurang sebanyak 23 orang atau 38 persen.

Pada sisi sustainabel, persepsi yang dinilai yakni seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes terus berkembang, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dapat dilestarikan dengan baik, serta Seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes berkelanjutan. Adapun sebaran responden berdasarkan persepsi dari sisi sustainabel dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini.

Tabel 11. Sebaran responden berdasarkan tingkat persepsi dari sisi sustainabel

Kriteria Skor	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
> 11	Baik	9	15
7 – 11	Cukup	41	68
< 7	Kurang	10	17

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 11, menunjukkan bahwa tingkat persepsi petani dari sisi sustainabel yang paling dominan pada kategori cukup yakni sebanyak 41 responden atau 68 persen. Sedangkan jumlah responden yang memiliki tingkat persepsi yang baik terhadap pengelolaan BUMDes dari sisi sustainabel sebanyak 9 responden atau 15 persen, serta yang memiliki persepsi kurang sebanyak 10 orang atau 17 persen.

Karakteristik petani yang menjadi variabel dalam pengujian ini adalah umur petani responden, pendidikan formal, jumlah anggota rumah tangga dan luas lahan usahatani. Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Hasil uji korelasi tri serial (hubungan persepsi dengan karakteristik petani)

Variabel	r_{tris}	t_{hit}	Keterangan
Umur	-0,502	4,248*	Signifikan
Pendidikan Formal	0,538	4,632*	Signifikan
Jumlah Anggota Rumah Tangga	-0,169	1,293	Tidak Signifikan
Luas Lahan Usahatani Garapan	-0,4995	4,221*	Signifikan

Keterangan :

Taraf uji nyata $\alpha = 5\%$, $df = 58$, $t_{\text{tab}} = 2,002$

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 12, menunjukkan bahwa umur, pendidikan formal dan luas lahan usahatani memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi petani terhadap alokasi dana desa dalam pengelolaan BUMDes yang bergerak dalam bidang pertanian. Umur petani dan luas lahan garapan cenderung memiliki hubungan terbaik dengan persepsi yakni semakin tua umur dan atau semakin luas lahan usahatani garapan, memiliki kecenderungan semakin tinggi tingkat persepsi petani. Sebaliknya pada pendidikan formal memiliki hubungan positif dengan persepsi petani, artinya semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pula persepsi petani. Sedangkan untuk jumlah anggota rumah tangga tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi petani.

4. SIMPULAN

Adapun kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil dan pembahasan penelitian ini adalah :

1. Responden petani yang paling banyak terdapat pada kelompok umur 41 – 45 tahun, dengan rata-rata pendidikan paling banyak pada level pendidikan dari SMP ke bawah, dan dengan jumlah anggota kebanyakan pada jumlah anggota rumah tangga 2 orang, serta dengan luas lahan garapan kebanyakan pada 0,75 – 1 hektar.
2. Tingkat persepsi petani yang paling dominan pada kategori cukup yakni 43 persen, sisanya berada pada kategori baik sebanyak 22 persen dan kurang sebanyak 35 persen.
3. Pada bagian transparan dan akuntabel persepsi petani yang masih kurang cukup banyak, dibandingkan dengan tingkat persepsi secara keseluruhan.
4. Umur, pendidikan formal dan luas lahan usahatani memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi petani terhadap alokasi dana desa dalam pengelolaan BUMDes yang bergerak dalam bidang pertanian, sedangkan pada variabel jumlah anggota rumah tangga tidak berhubungan signifikan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Peneliti dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dana penelitian melalui Hibah Penelitian Dosen Wajib Meneliti (PDWM) Tahun 2022 dengan Pembiayaan PNPB Universitas di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022 KLASER PEMULA Nomor : 458/UN8/PG/2022 tanggal 28 Maret 2022.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1)
- Arifin P & Soeria Atmadja, (2009). *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Ed. Ke-1, h. 176)
- Budiono, P. (2015). *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro: Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*, 5(1).
- Effendi, S. (2008). *Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi*.
- Hadi, Sutrisno. (2000). *Metodologi Riset Jilid III*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Irma, A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 3(1).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Rakhmat, (2007). *Psikologi Komunikasi, edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Samsudin. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Seran, E. D., Rorong, A. J., & Londa, V. (2017). Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(046).
- Slameto, (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sulastris, N. (2016). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Kendari: Universitas Halu Oleo.
- Sumarni, S., Masnidar, M., & Noveri, I. (2020). *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Pengembangan Desa Tertinggal (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Muaro Jambi)*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Umanailo, M. C. B., Assagaf, S. A., Bahasoan, H., Nawawi, M., Umanailo R., Hentihu, I, Bula, M., Ningkeula, E. S., Jumu, L., & Hamid, I. (2018). *Naskah Akademik Badan Usaha Milik Desa*.
- Zulpikar, E. (2018). *Pengaruh Badan Usaha Milik Desa dan Alokasi Dana Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pada Desa Wanasari, Desa Citanglar, Desa Kademangan, Desa Gunung Sungging*. Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

